

**LITERASI POLITIK PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

Skripsi

Oleh:

ARYO ANDIKA DEGENG MAHOTAMA

NPM 2156021029



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

**LITERASI POLITIK PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

Oleh:

ARYO ANDIKA DEGENG MAHOTAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK
LITERASI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2024

Oleh
ARYO ANDIKA DEGENG MAHOTAMA

Penelitian ini dilatarbelakangi Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2024 menjadi momen penting dalam demokrasi lokal, namun tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk literasi politik yang telah dilakukan terhadap masyarakat dalam menyikapi Pilwalkot 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Bernard Crick tentang literasi politik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi perwakilan KPU, media (TVRI), partai politik, tokoh masyarakat, dan masyarakat pemilih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan politik masyarakat masih rendah, ditandai dengan banyaknya pemilih yang tidak mengetahui Pengetahuan terhadap calon dan minimnya pemahaman terhadap mekanisme pemilu. Keterampilan politik pemilih juga belum berkembang optimal, terlihat dari ketidakmampuan dalam memilah informasi yang valid dan kecenderungan menerima informasi politik tanpa analisis kritis, sehingga rawan terpengaruh hoaks. Sementara itu, sikap politik masyarakat cenderung pasif dan apatis, dengan partisipasi terbatas hanya sebatas hadir di TPS tanpa keterlibatan aktif dalam proses politik lainnya. Kesimpulannya, literasi politik pemilih pada Pilwalkot 2024 masih tergolong rendah secara umum. Diperlukan strategi literasi politik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal.

Kata Kunci: Literasi Politik, Pengetahuan Politik, Keterampilan Politik, Sikap Politik, Pilwalkot 2024, Partisipasi Pemilih

ABSTRACT

"POLITICAL LITERACY IN THE 2024 BANDAR LAMPUNG MAYORAL ELECTION"

By

ARYO ANDIKA DEGENG MAHOTAMA

The 2024 Bandar Lampung mayoral election marked a significant moment in local democracy; however, voter turnout experienced a substantial decline compared to previous elections. This study aims to analyze the forms of political literacy that have been implemented to educate the public in response to the 2024 mayoral election. The theoretical framework used is based on Bernard Crick's concept of political literacy, which includes political knowledge, political skills, and political attitudes. The research method employed is descriptive qualitative, with data collected through interviews and documentation. Informants in this study include representatives from the General Elections Commission (KPU), media (TVRI), political parties, community leaders, and voters. The results show that public political knowledge remains low, as evidenced by the large number of voters unaware of candidates' visions and missions, as well as their limited understanding of electoral mechanisms. Political skills have also not developed optimally, with voters generally unable to distinguish between valid and misleading information, making them vulnerable to hoaxes. Meanwhile, political attitudes tend to be passive and apathetic, with participation often limited to voting at polling stations without further engagement in the political process.

In conclusion, voter political literacy in the 2024 mayoral election remains generally low. More effective, inclusive, and sustainable political literacy strategies are needed to improve the quality of public participation in local democratic processes.

Keywords: Political Literacy, Political Knowledge, Political Skills, Political Attitudes, 2024 Mayoral Election, Voter Participation

Judul Skripsi

: **LITERASI POLITIK PEMILIH PADA
PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2004**

Nama Mahasiswa

: **Aryo Andika Degeng Mahotama**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2156021029**

Program Studi

: **S-1**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1.Komisi Pembimbing

Dr.Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A

NIP 1978040302005011002

2.Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Tabah Maryanah

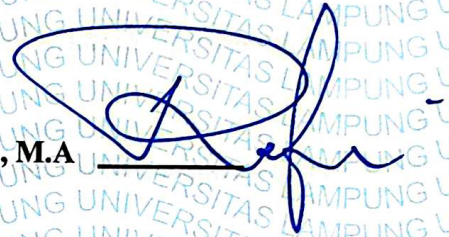
NIP 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A**



Penguji Utama : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Guslina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 19760821200032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Aryo Andika Degeng Mahotama

NPM 2156021029

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aryo Andika Degeng Mahotama, dilahirkan di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 9 April 2003. Penulis merupakan Putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayah I Wayan Dirpha dan Ibu T Mustika Indah. Penulis memiliki seorang adik bernama Sekar Ayu Andini Putri Yanika. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikan di SD AL-Azhar 1, Kota Bandar Lampung pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP N 23 Bandar Lampung pada tahun 2018, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAS YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama menjalani studi, penulis tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik, tetapi juga aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. pada tahun 2022, Penulis bergabung pada Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai Anggota Magang Biro 1 Periode 2022/2023 yang membidangi bidang Kajian dan Keilmuan. Kemudian Penulis melanjutkan karir di dunia kemahasiswaannya di Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sebagai Anggota Biro 3 Periode 2023/2024. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Lampung selama 6 bulan, dimulai dari tanggal 26 Februari 2024 sampai 2 Agustus 2024. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi penulis dalam memahami dinamika kerja di lingkungan birokrasi dan pengabdian masyarakat.

MOTTO HIDUP

“Aku tidak pernah menarik kata-kata ku”

(Uzumaki Naruto)

“Jika ingin sesuatu dilakukan dengan baik, lakukanlah sendiri”

(Napoleon Bonaparte)

“Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah”

(Monkey D. Luffy)

PERSEMBAHAN



Alhamduillahirabbil'alamiin, telah engkau ridhoi Ya Allah langkah hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Teriring Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

dan

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua Orang Tua Ku Papah Tersayang

Kol. Czi (Purn) I Wayan Dirpha

Mamah Tersayang

T. Mustika Indah

Adik ku tercinta

Sekar Ayu Andini Putri Yanika

Serta Nenek Tercinta

Hj. Yusnani Barlian

Terimakasih untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan kepadaku, terima kasih untuk tetap mempercayai mimpiku disaat semua orang mencoba menghancurkannya, dalam setiap helaan nafas dan tulusnya perjuangan, semoga menjadi amal baik yang tidak terhapuskan.

**Kepada teman-teman seperjuangan dan Kepada Almamater yang Penulis
cintai dan banggakan Universitas Lampung**

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Literasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2024”. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya. Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing pada penelitian ini. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas waktu, perhatian, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses ujian skripsi ini. Semoga setiap kebaikan, waktu, dan ilmu yang Bapak berikan menjadi berkah yang tiada henti. Penulis akan selalu mengenang dengan penuh rasa terima kasih atas segala bimbingan dan ketulusan hati yang telah Bapak berikan. Tanpa bantuan Bapak perjalanan ini tidak akan menjadi berarti seperti sekarang.
4. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

5. Bapak Sigit Krisbintoro, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembahas Penulis. Terimakasih atas segala kritik dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan disetiap langkah Ibu. Aamiin.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Penulis sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Penulis.
7. Narasumber-narasumber pada penelitian ini yang telah bersedia memberikan informasi dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas waktu, kesediaan, dan keterbukaan Bapak dan Ibu dalam berbagi wawasan serta informasi yang sangat berharga.
8. Kedua orang tua Penulis Papah I Wayan Dirpha dan Mamah T Mustika Indah yang sangat Penulis cintai, Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti yang telah diberikan, tidak ada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan betapa besar cinta dan pengorbanan kalian selama ini. Dalam setiap lelah kalian, ada kasih sayang. Dalam setiap doa kalian, ada kekuatan yang menopang langkah, bahkan di saat Aryo sendiri hampir menyerah. Terima kasih telah mengantar Aryo sampai berhasil menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Teruntuk Papah Penulis, kata terimakasih senantiasa diucapkan kepada engkau atas didikan engkau kepada Penulis dalam membentuk karakter anakmu ini untuk menjadi lelaki tangguh yang selalu siap bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Kepada Mamah Penulis, maaf Mah anakmu ini selalu buat khawatir dan membuat Mamah selalu menangis karena tindakan anakmu ini, berjuta kata terimakasih Penulis haturkan atas semua do'a dan segalanya yang telah engkau berikan kepada Penulis. Semoga setiap langkahku selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk Papah dan Mamah. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan dan melindungi kepada kita. Aamiin Allohmmaa Aamiin.

9. Kepada Adikku Sekar Ayu Andini Putri Yanika yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah kamu berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, kebahagiaan, dan kesuksesan disetiap langkah kamu.
10. Kepada keluarga besar ku. Terima kasih atas segala semangat dan dukungannya yang tak pernah putus kepada peneliti. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh keluarga besar. Atas setiap doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti mengiringi langkah penulis, rasa terima kasih ini tidak akan pernah cukup terucapkan. Kehangatan, perhatian, dan semangat yang keluarga berikan telah menjadi sumber kekuatan yang menguatkan penulis untuk terus bertahan dan melangkah, bahkan di saat-saat tersulit.
11. Untuk sahabat-sahabatku Apes, Atis, Adam, Allka, Dapin, Ipan, Egel, Apip dan made Terimakasih atas dukungan dan hubungan kekeluargaan yang telah kita lalui Bersama, meskipun jarak dan kesibukan yang kita lalui masing masing ada kebersamaan yang selalu kita usahakan. Semoga ikatan dan hubungan baik ini terus terjaga dan kita selalu tetap saling mendukung satu sama lain.
12. Sahabatku Iceng dan Nanab, terima kasih telah menjadi orang baik yang telah mendukung perjalanan sampai sejauh ini, menjadi tempat dimana penulis dapat bercerita dan menjadi sahabat yang mengingatkan ketika penulis salah langkah. Terima kasih banyak atas dorongan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi dan tidak pernah henti dalam memberikan dukungan.semoga hubungan baik yang telah kita lewati tetap selalu terjaga dengan baik.
13. Sahabat Penulis semasa perkuliahan “REKSATEQ”, Mas Rai, Wan Andhika, Paisur, Mas Gips, Rapli, Mas Bim, Wahyu, Sisy, Vania, Biya, Bela, Desta, Nita, Ira, Jahdir, Mojel, Refina, Gianin, dan Safira. Sudah banyak hal yang di lalui bersama-sama dalam masa perkuliahan baik senang maupun susah saling merangkul satu sama lain kalian keren. Tetap semangat semuanya dalam menggapai impian masing-masing. Terima kasih untuk kalian, Sahabat serta keluarga yang menemani perjalanan penulis. Kalian telah memberikan

14. dukungan moral dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan yang telah penulis lalui.
15. Sahabatku Bisma Nugroho terima kasih atas semua hal baik yang telah diberikan. Terima kasih selalu mengingatkan, menemani dan menjadi tempat bertanya selama perjalanan ini, semoga perjalanan bisma selalu di kelilingi orang-orang baik.
16. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama perkuliahan.
17. Kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih dan memohon maaf atas keterbatasan tidak bisa menyebutkan satu persatu

Bandar Lampung, Juli 2025

Penulis,

Aryo Andika Degeng. M.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Literasi Politik.....	11
2.1.1 Indikator yang Mempengaruhi Literasi Politik.....	14
2.2 Tinjauan Media Informasi Publik.	15
2.2.1 Informasi Politik	17
2.3 Peran Informasi Politik	18
2.4 Tinjauan Pemilihan Walikota.....	19
2.5 Kerangka Pikir	22
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Fokus Penelitian	25
3.4 Penentuan Informan	25
3.5 Jenis Data	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Pengolahan Data	28
3.8 Teknik Analisis Data.....	28
3.9 Teknik Validitas Data	30
BAB IV	31
GAMBARAN UMUM	31

4.1	Kota Bandar Lampung	31
4.2	Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	33
4.3	Sejarah Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung	33
4.4	Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2024.....	35
4.3.1	Tahapan Pra Pemilihan.	35
4.3.2	Masa Kampanye dan Sosialisasi.....	37
4.3.3	Pemuthakiran Data Pemilih	38
4.3.4	Dinamika Politik.....	39
4.3.5	Hasil Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2024	40
BAB V.....		42
HASIL DAN PEMBAHASAN		42
5.1	Hasil Penelitian	42
5.1.1	Pengetahuan Politik	43
5.1.2	Keterampilan Politik.....	48
5.1.3	Sikap Politik	54
5.2	Pembahasan.....	60
5.2.1	Pengetahuan Politik	60
5.2.2	Keterampilan Politik.....	64
5.2.3	Sikap Politik	69
BAB VI.....		74
KESIMPULAN DAN SARAN		74
6.1	Kesimpulan	74
6.2	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pesebaran DPT Kota Bandar Lampung Pada Pilwalkot 2024	5
Tabel 1. 2 Rentan Usia Pemilih pada Pemilu 2024.....	6
Tabel 3. 1 Informan.....	26
Tabel 5. 1 Sikap partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2024	57
Tabel 5. 2 Poin-poin wawancara pengetahuan politik	60
Tabel 5. 3 Poin-poin wawancara Keterampilan Politik	64
Tabel 5. 4 Poin-poin wawancara Sikap Politik	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Fikir	23
Gambar 5. 1 Sketsa pemilu	44
Gambar 5. 2 Sudut Pandang	45
Gambar 5. 3 Debat Politik 2024.....	45
Gambar 5. 4 Iklan Layanan Masyarakat TVRI.....	50
Gambar 5. 5 Konser Musik Gen Z	50
Gambar 5. 6 Live Streaming YT TVRI	55
Gambar 5. 7 Nonton Bareng Debat Politik	56
Gambar 5. 8 Kampanye Pemilihan Walikota 2024.....	56

DAFTAR SINGKATAN

DPT; Daftar Pemilih tetap

Gerindra : Gerakan Rakyat Indonesia Raya

HAM : Hak Asasi Manusia

KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia

KPU :Komisi Pemilihan Umum

Pemilu: Pemilihan Umum

Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah

Pilwalkot : Pemilihan walikota

TPS: Tempat Pemungutan Suara

TVRI : Televisi Republik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 memiliki momentum penting yaitu dengan akan diadakanya Pemilihan walikota (Pilwalkot) sebagai salah satu wadah demokrasi yang ada di Indonesia. Pilwalkot tidak hanya sebagai ajang untuk memilih pemimpin tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan dan pemilihan kebijakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus dapat menentukan pemimpin dengan cara berperan aktif dikarenakan kemajuan dari Kota Bandar Lampung akan dipengaruhi oleh pilihan masyarakat itu sendiri. Menurut Andini Sari (2023) Pilwalkot juga dianggap sebagai indikator demokrasi di tingkat lokal, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk langsung memilih pemimpin yang akan membawa daerah mereka ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, Pilgub tidak hanya penting bagi daerah, tetapi juga berdampak signifikan bagi stabilitas politik dan ekonomi nasional

Pemilihan Walikota diatur dalam undang-undang dan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Anissa. 2024). Dalam setiap Pilwalkot, masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan pembangunan yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, dan mengatasi permasalahan yang ada di tingkat kota (Sahbana, 2017).

Menurut Dedi (2022) Pilwalkot merupakan kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan mereka. Untuk itu, partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan agar proses pemilihan berjalan dengan demokratis. Dalam

konteks ini, literasi politik menjadi sangat penting, karena pemilih yang memiliki pemahaman yang baik tentang calon-calon Gubernur dan kebijakan akan lebih memudahkan masyarakat membuat keputusan yang cerdas dan tepat.

Dalam era teknologi yang semakin maju Pilwalkot juga semakin dipengaruhi oleh media massa. Penyebaran informasi yang cepat dan luas melalui internet, televisi, radio, dan media sosial mempengaruhi cara masyarakat mendapatkan informasi mengenai pemilihan. Oleh karena itu, calon Walikota dan tim kampanye mereka harus mampu memanfaatkan media dengan bijak, serta menyampaikan pesan yang jelas dan tepat sasaran agar dapat memenangkan hati pemilih. Menurut Bao & Samosir (2021) media masa maupun elektronik merupakan media komunikasi yang paling sering digunakan dalam berbagai aktifitas politik.

Berkembangnya media massa memiliki tantangan serius, mudahnya informasi tersebar dapat menyebabkan banyaknya juga informasi hoaks yang belum tentu benar sehingga dapat merubah pandangan politik masyarakat oleh karna itu, penting bagi masyarakat untuk dapat memahami serta menganalisis informasi politik yang ada ditengah mudahnya informasi tersebar dan banyaknya *buzzer* yang memenuhi sosial media yang disebabkan oleh kemajuan dari media massa saat ini. Literasi politik terhadap masyarakat tentunya diharapkan menjadi solusi dari masalah ini.

Menurut Aurelia Oktavira (2024) *buzzer* adalah orang yang memanfaatkan akun sosial media miliknya guna menyebarluaskan informasi atau melakukan suatu promosi maupun iklan dari suatu produk atau jasa pada perusahaan atau instansi. Mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan mempromosikan, mengkampanyekan, atau mendengungkan suatu topik. *Buzzer* banyak digunakan dalam kampanye oleh pasangan calon terutama di sosial media.

Dalam menghadapi Pilwalkot tahun 2024, pemahaman masyarakat terhadap informasi seputar penyelenggaraan Pilwalkot tentunya sangat diharapkan agar dapat mengatasi berbagai informasi yang tidak akurat dalam menyikapi Pilwalkot 2024. Informasi yang tidak akurat atau informasi *hoax* pastinya akan menciptakan kondisi yang kurang kondusif di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Arif (2016) politik dan informasi *hoax* menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan di era *digital* saat ini, oleh karena itu penanaman nilai-nilai ideologis menjadi sebuah hal yang sangat penting guna menekan laju pertumbuhan informasi *hoax* (Akhyar Anshori dkk, 2023).

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang untuk dapat membaca, menulis, serta berbicara, agar dapat berpikir secara kritis dalam berbagai bentuk komunikasi. Bukan hanya sekadar kemampuan teknis untuk membaca dan menulis, literasi juga dapat mencakup pemahaman terhadap konteks, evaluasi informasi, dan kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-ide secara efektif. pemahaman kritis terhadap informasi dalam konteks sosial dan budaya. Ini menunjukkan bahwa literasi adalah keterampilan yang terus berkembang seiring dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Ali Rasyid (2023) literasi politik merujuk pada kemampuan individu dalam memahami sistem politik seperti, hak-hak serta kewajiban warga negara dalam proses demokrasi dan cara berpartisipasi masyarakat dalam proses politik sehingga masyarakat dapat menentukan pemimpin yang akan dipilih. Literasi politik juga dapat membuat masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program-program yang ditawarkan serta dampak dari kebijakan yang akan diambil oleh calon terpilih yang membuat masyarakat akan berfikir secara kritis, hal ini sesuai dengan pernyataan Denver dan Hands (1990) literasi politik (*political literacy*) merupakan pengetahuan serta pemahaman terhadap proses politik dan isu-isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga negara dalam (Sutisna, 2017).

Menurut Norris (2000), literasi politik mencakup pengetahuan tentang sistem politik, isu-isu politik, dan keterampilan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Literasi politik yang baik memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan umum dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Untuk itu literasi politik bukan hanya sekedar

terkait sampai informasi politik. Melainkan dapat menjadi indikator dalam menaikkan kemampuan masyarakat dalam memahami isu serta aktivitas politik agar masyarakat dapat mengetahui jalannya demokrasi dan pemerintahan secara utuh.

Menurut Bao & Samosir (2021) literasi politik berkaitan dengan pemahaman warga antara lain tentang konsep-konsep dasar pemerintahan sehingga memahami bagaimana sebuah pemerintahan berjalan, apa saja *problem* yang dihadapi sampai dengan pemahaman kritis untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan atau praktik politik secara umum. Besar kecilnya peningkatan dampak kemampuan politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dalam mendukung literasi politik sehingga tidak dapat ditangani secara sendiri oleh masyarakat untuk itu lembaga pemerintahan memiliki kewajiban dalam meningkatkan literasi politik masyarakat khususnya dalam proses demokrasi di Indonesia

Menurut penelitian yang dilakukan Sulisty (2024) literasi politik yang dilakukan oleh media dengan tujuan meningkatkan literasi politik anak muda di Kota Bandar Lampung berdasarkan indikator pengetahuan politik, kesadaran anak muda terhadap pemilu 2024 meningkat pesat berkat kemajuan dari digitalisasi. Anak muda banyak mendapatkan informasi terkait politik melalui media massa. Akan tetapi kenyataannya pada Pilwalkot 2024 ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pilwalkot menurun drastis. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan hanya 52% atau sebanyak 409.093 pemilih padahal KPU sendiri mengharapkan tingkat partisipasi masyarakat ada di angka 70-75%.

KPU Provinsi Lampung merilis pada pemilihan walikota sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2020 partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung ada di angka 69,12% angka ini dapat dikatakan cukup tinggi apalagi jika kita mengingat pada pemilihan tersebut kegiatan masyarakat sedang dibatasi dikarenakan adanya bencana Covid-19. Untuk itu penyebab turunnya partisipasi masyarakat pada pilwalkot ini merupakan permasalahan besar apa penyebab dari terjadinya fenomena ini perlu ditindak lanjuti, literasi politik

masyarakat harus kembali di tingkatkan agar fenomena ini tidak berlanjut pada pemilihan pemilihan selanjutnya. Mudahnya informasi tersebar perlu ditindak lanjuti dikarnakan akan mudahnya juga berita *hoax* yang dipublikasikan tidak hanya itu di media sosial juga saat ini dipenuhi banyak sekali *buzzer*.

Berdasarkan data dari KPU pada Pilwalkot 2024 di Kota Bandar Lampung ini terdapat 786.182 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh dua) daftar pemilih tetap (DPT) yang akan memilih Walikota dan wakil Walikota. Angka ini cukup tinggi juga meningkat mengingat pada Pilgub Provinsi Lampung yang telah di selenggarakan pada tahun 2018 Kota Bandar Lampung memiliki 622.829 (enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan) daftar pemilih tetap.

Tabel 1. 1 Pesebaran DPT Kota Bandar Lampung Pada Pilwalkot 2024

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap
1	Kemiling	60.547
2	Kedaton	38.619
3	Sukarame	48.632
4	Tanjung Karang Barat	44.641
5	Panjang	51.956
6	Tanjung Karang Timur	27.547
7	Tanjung Karang Pusat	36.146
8	Teluk Betung Selatan	28.469
9	Teluk Betung Barat	26.672
10	Teluk Betung Utara	36.442
11	Rajabasa	40.663
12	Tanjung Senang	44.721
13	Sukabumi	52.149
14	Labuhan Ratu	34.595
15	Way Halim	50.160

16	Langkapura	30.597
17	Enggal	18.678
18	Kedamaian	38.878
19	Teluk Betung Timur	34.830
20	Bumi Waras	41.240

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas jumlah daftar pemilih tetap di Kota Bandar Lampung terbagi dalam 20 kecamatan dengan Kecamatan Kemiling menjadi daerah dengan daftar pemilih terbanyak dengan 60.547 pemilih dan Kecamatan Enggal menjadi daerah dengan jumlah pemilih paling sedikit dengan 18.678 daftar pemilih.

Pesebaran yang cukup luas dan dengan tingkat populasi yang tidak merata di setiap kecamatan membuat sebuah tantangan terhadap peningkatan literasi politik masyarakat. Mengingat Kota Bandar Lampung sendiri sebagai ibu Kota dari Provinsi tentunya mayoritas dari masyarakat memiliki televisi yang biasa digunakan sebagai sarana mendapatkan informasi yang sangat efektif. Akan tetapi di era digitallisasi 4.0 ini banyak masyarakat khususnya generasi milenial dan generasi z yang memiliki ketergantungan dalam mencari atau mendapatkan informasi melalui sosial media yang tentunya lebih praktis dikarenakan tidak perlu menggunakan jadwal seperti tayangan televisi. Menurut data yang di dapatkan peneliti dalam penyebaran pemilih berdasarkan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden 2024 lalu, pemilih di Kota Bandar Lampung sendiri banyak di dominasi oleh generasi milenial berikut data pesebaran pemilih berdasarkan rentan usia pada pemilihan umum 2024 yang lalu.

Tabel 1. 2 Rentan Usia Pemilih pada Pemilu 2024

No	Generasi (Usia)	Jumlah Pemilih
1	Generasi Z (17-24)	146.479 (18%)
2	Generasi Milenial (25-39)	273.742 (35%)

3	Generasi X (40-55)	227.143 (29%)
4	Generasi Baby Boomer (56-76)	129.159 (16%)
5	Lanjut Usia (76 keatas)	13.602 (2%)

Sumber: Jurnal Santoso dkk (2024)

Dari rentan usia tersebut dimana di dominasi oleh generasi milenial serta generasi z yang mencapai 53% tentunya menjadi tantangan bagi masyarakat dalam beradaptasi di era *digital* ini terutama dalam mendapatkan informasi yang actual di Kota Bandar Lampung apalagi saat ini dalam mencari informasi banyak memanfaatkan sosial media. tidak hanya itu, generasi x dan generasi *baby boomer* terutama di Kota Bandar Lampung tentunya memiliki media sosial akan tetapi mereka juga rentan terhadap penyebaran *hoax* dikarenakan masih banyak yang belum menguasai media sosial. Bagaimana langkah serta cara Lembaga Pemerintah dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan yang akan mendorong partisipasi masyarakat terhadap Pilwalkot merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas.

Dalam hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik ini dan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti yang bertujuan sebagai bahan acuan serta pertimbangan dalam pembuatan penelitian ini. Dengan adanya beberapa penelitian yang dapat menjadi pembanding dengan penelitian ini sebagai berikut

1. Fajar Pratama, Juwandi, Bahrudin (2022) dengan judul “Pengaruh Literasi Politik dan Informasi Hoax terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa” hasil dari penelitian ini yaitu Literasi politik dan informasi hoax memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa. Pengaruh tersebut didasarkan pada kesadaran dan kepercayaan mahasiswa yang didapatkan dari informasi yang mereka terima sehingga diolah menjadi suatu informasi baru atau pengetahuan. Selain itu juga kesadaran dan kepercayaan tersebut tidak hanya terkait dengan tingkat pengetahuan, tetapi juga dengan pemahaman, minat, serta keterampilan warganegara dalam mengolah suatu

informasi politik yang dapat menjadikan mahasiswa berpartisipasi aktif (kuantitatif)

2. Katarudin & Putri (2018) “Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Kota Pariaman Tahun 2018” hasil dari penelitian ini menunjukkan Literasi memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik pemilih pemula terkhusus literasi politik yang melalui penggunaan teknologi informasi komunikasi baik secara elektronik, media cetak maupun online. Sementara literasi politik yang dilakukan secara konvensional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilih pemula (kuantitatif)
3. Fitriani, Amimudin, Rengi (2022)“Pengaruh Media Sosial Terhadap Literasi Politik Generasi Milenial” hasil dari penelitian ini yaitu, media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan, kesadaran politik generasi milenial. Hal ini terlihat dari bagusnya budaya politik kaum milenial di Indonesia, berkat keaktifan mereka dalam membahas isu-isu politik di media sosial. Dan pada umumnya mereka mengaku mendapatkan informasi politik melalui media online, khususnya media sosial. Kecerdasan politik generasi milenial ini cukup membuat mereka terinformasi dengan baik untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat politiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. (kualitatif)
4. Odi (2023)“Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKN FKIP Universitas Lampung” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa literasi politik berpengaruh positif terhadap 53,1% terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dimana mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung memiliki budaya politik partisipan yang cukup baik. Selain itu mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung memiliki bentuk partisipasi politik non-konvensional, dan dalam hal tipologi partisipasi politik mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung mayoritas berpartisipasi secara aktif dan sebagian lain berpartisipasi secara pasif. (Kuantitatif)
5. Lidia, C. R. (2024) “Literasi Politik Di Era Digital Dalam Memahami Isu-Isu Politik Bagi Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun

2024” Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa media sosial yang digunakan pemilih pemula dalam mendapatkan pengetahuannya terkait informasi-informasi politik Pilkada 2024 berpengaruh terhadap perilaku pemilih pemula dalam menentukan Pilihannya. Dengan maraknya informasi informasi politik yang ada pada media sosial memudahkan pemilih terutama pemilih pemula dalam mengenal calon yang akan dipilihnya. Meskipun media sosial memberikan peluang besar bagi pemangku kepentingan pemilu untuk meningkatkan kesadaran politik, platform ini juga membawa tantangan berupa penyebaran disinformasi atau berita palsu. (Kualitatif Deskriptif)

Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada metode penelitiannya yaitu dimana pada judul satu dua dan empat menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan perbedaan dengan judul tiga dan lima terletak pada subjek dari penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian, serta berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan maka dirumuskan masalah untuk dijadikan pedoman didalam penelitian agar dapat mencapai tujuan dari penelitian. Adapun masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana literasi politik pemilih dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu, untuk mengetahui apa saja literasi yang telah dilakukan terhadap pemilih pada pemilihan Walikota Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pihak akademisi sebagai sumber bacaan serta untuk menambah wawasan dalam

penelitian selanjutnya bagi peneliti dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya bagi pemerintah dalam meningkatkan literasi politik masyarakat yang akan membantu meningkatkan jumlah partisipasi dalam pemilihan kedepan serta dapat dijadikan referensi sebagai bahan bacaan bagi masyarakat luas sebagai bahan menjawab permasalahan mengenai literasi politik yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literasi Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) literasi merupakan kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Pengertian Literasi yaitu pengetahuan dan keterampilan pada aktivitas tertentu lebih lanjut dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengolah sebuah informasi dan pengetahuan untuk diterapkan dalam kehidupan. Menurut Lestari dkk (2021) literasi merupakan wujud keterampilan seseorang secara nyata, spesifiknya merupakan keterampilan kognitif dari membaca dan menulis, terlepas dari konteks keterampilan itu didapat dari siapa serta dengan cara apa memperolehnya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi seseorang tentang sebuah makna literasi itu sendiri adalah penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan juga pengalaman.

Literasi saat ini untuk saat ini tidak hanya sekedar kemampuan dalam membaca menulis literasi politik adalah kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan menilai informasi politik serta berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang bertanggung jawab dan efektif. Literasi politik melibatkan pengetahuan tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta keterampilan untuk berkomunikasi secara politik dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini membuat bagaimana literasi politik dapat diterapkan sebagai sebuah pengetahuan, politik dari hal hal kecil seperti isu-isu politik serta dapat mempengaruhi diri sendiri dan orang lain dalam melakukan pengambilan keputusannya (Katarudin & Putri, 2018).

Menurut Rosalia (2016) literasi politik adalah sebuah upaya pemberian pemahaman tentang politik kepada masyarakat agar mampu mengikuti kegiatan politik. Salah satu hal yang paling harus diperhatikan dari literasi politik adalah pengetahuan dasar tentang sistem pemerintahan dan proses politik. Hal ini mencakup pemahaman individu dalam mengetahui struktur pemerintahan, dasar hukum, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tanpa adanya pengetahuan ini, seseorang akan kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam memilih seorang pemimpin atau menentukan sikap terhadap kebijakan tertentu. Literasi politik dapat membantu individu memahami bagaimana suara mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik dan bagaimana hak-hak mereka sebagai warga negara dapat dilindungi dalam sistem pemerintahan.

Menurut Akhyar Anshori dkk (2023) kemampuan individu untuk dapat menganalisis sebuah informasi politik juga merupakan bagian dari literasi politik. Penyebaran informasi yang begitu cepat dan beragam dari berbagai sumber, membuat terkadang ada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, keterampilan untuk menganalisis sebuah informasi sangatlah penting. Individu yang telah memiliki literasi secara politik mampu untuk mengevaluasi benar salahnya sebuah informasi yang diterimanya, mengenali informasi yang salah, serta memahami sudut pandang yang berbeda. Dengan adanya kemampuan ini, seseorang dapat menghindari penyebaran hoaks dan manipulasi informasi yang sering terjadi terutama pada informasi politik.

Selain itu, literasi politik melibatkan partisipasi aktif dari setiap individu dalam menjalankan proses politik. Menurut Sitepu dalam jurnal Sukma dan Wardhani (2018) partisipasi politik merupakan aktifitas mengikuti perkembangan yang dilakukan secara individu maupun kelompok masyarakat secara tidak langsung mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini tidak hanya saat adanya pemilihan umum, tetapi juga mencakup keterlibatan individu dalam diskusi publik, penyampaian

pendapat, serta tindakan lain yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ia juga menambahkan warga negara yang memiliki literasi secara politik lebih cenderung terlibat dalam upaya-upaya perubahan sosial dan politik yang konstruktif, baik melalui organisasi masyarakat atau gerakan sosial. Dengan berpartisipasi aktif, masyarakat turut berperan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Menurut Wisnumurti (2018) literasi politik dalam menjaga kelangsungan demokrasi sangatlah penting. Dengan individu dapat memahami sistem politik dan isu-isu yang ada, serta memiliki keterampilan untuk berpartisipasi sehingga, individu dapat berperan dalam pengambilan keputusan yang adil dan berkelanjutan. Literasi politik bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan bersama, demi menciptakan kehidupan politik yang lebih baik dan harmonis

Menurut peneliti dari berbagai penjelasan mengenai literasi politik pemahaman politik dan partisipasi dalam hal ini masyarakat harus memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang salah satunya yaitu dengan cara melakukan pilihan politik atau ikut berpartisipasi dalam konstentasi politik. Karena pada dasarnya studi mengenai literasi politik ini memiliki keterkaitan dengan kualitas penyelenggaraan Pemilu disuatu negara.

Menurut Akhyar Anshori (2023) rendahnya literasi politik masyarakat dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan penyebaran informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, selain melakukan kegiatan literasi politik bagi masyarakat, pemerintah dan partai politik seharusnya dapat berperan aktif juga dalam membangun kesadaran masyarakat dalam bidang literasi media. Pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh media akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas masyarakat khususnya dalam bidang politik, hal ini

merujuk pada pernyataan Westhom (1990) dalam Hernitasari (2023) bahwa literasi politik pada dasarnya merupakan kemampuan dari warga negara, yang dikembangkan agar warga negara dapat untuk memenuhi perannya dalam kehidupan demokrasi. Dalam mencapai hal tersebut menurut Bernard Crick dalam buku Gun Haryanto menyatakan bahwa dalam membangun sebuah literasi politik masyarakat terdapat tiga poin penting sebagai indikator yakni, pengetahuan politik, keterampilan politik, dan sikap politik masyarakat itu sendiri.

2.1.1 Indikator yang Mempengaruhi Literasi Politik

Menurut Bernard crick dalam Kadarisman & Gemiharto (2017) terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi penilai literasi politik masyarakat yaitu:

1. Partisipasi politik

Partisipasi politik aktif dan pasif. Dikatakan aktif apabila masyarakat tersebut terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pemerintah, dll. Sementara partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang mencerminkan ketidaktaatan terhadap keputusan pemerintah.

2. Pengetahuan politik

Hal ini terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai politik dan aspek aspek yang berhubungan dengan politik itu sendiri. Konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian dan alokasi merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik

3. Keterampilan politik

Masyarakat dapat mengevaluasi sendiri kandidat dari proses akhir politik, terkait dengan evaluasi menyeluruh disetiap tingkatan kampanye Pemilu. Masyarakat memiliki hak untuk dapat mengevaluasi dan merekomendasikan apakah seorang kandidat politik layak atau tidak untuk dapat dipilih.

2.2 Tinjauan Media Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sebuah pilar dari kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, dan *good governance* di Indonesia. Hak masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi serta mendapatkan jaminan, dan implementasi merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik hal ini juga dapat menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan (Indah Tiara & Harianti Puji. 2018)

Berdasarkan UU No. 14/ tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik”, terdapat definisi dari informasi publik itu sendiri yaitu, informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut Wardah dkk (2017) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Menurut Ase S. Muchyidin (1999) dalam Fitriani dkk (2023) memberikan sebuah informasi publik yang mengarah pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan dalam: Memberikan layanan dimana masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara nasional. Menurut Rumata (2017) keberhasilan penyebaran suatu informasi dapat ditentukan oleh media yang digunakan sebagai perantaranya, baik yang bersifat langsung seperti komunikasi tatap muka, atau komunikasi yang melalui teknologi. Ia juga menambahkan media massa seperti televisi dipandang dapat lebih efektif dalam melakukan penyebaran informasi publik secara serempak dengan

sasaran yang jauh lebih luas dibandingkan dengan internet hal ini dapat dikatakan setelah menimbang kesenjangan digital yang ada diwilayah Indonesia.

Selaras dengan hal tersebut pendapat McQuail (2011) dalam Gunshaputra & Anggraini (2020) mengatakan bahwa televisi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas. Informasi suatu hal penting bagi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipenuhi, jika dalam penggunaan televisi masyarakat tidak mendapatkan informasi yang seharusnya mereka dapatkan maka, televisi sudah keluar dari fungsinya sebagai penyedia informasi.

Menurut Hafied (2007) dalam Purniati & Iqbal (2022) televisi adalah suatu alat yang dapat digunakan sebagai tempat komunikasi yang searah dan dapat menjadi sangat efektif dalam penyampaian pesan-pesan kehidupan dengan adanya televisi dapat dianggap sebagai media pembelajaran yang efektif dan menarik, hal ini dikarenakan televisi merupakan alat yang dapat merekam dan menangkap objek gambar hidup yang sebenarnya. Manusia dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dan informasi terkini dari belahan bumi lainnya dengan cepat salah satunya adalah akibat dari peranan televisi.

Selaras dengan pernyataan sebelumnya Indah Tiara & Harianti Puji (2018) menambahkan bahwa televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar hidup yang bisa bersifat politis, bisa informatif, memberikan hiburan, pendidikan, atau bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut. Sebagai media informasi, televisi memiliki kekuatan yang dominan untuk menyampaikan pesan. Karena media ini dapat menghadirkan pengalaman kepada penonton yang seolah-olah dialami sendiri. dengan memiliki jangkauan yang luas dan dapat diterima dalam waktu yang bersamaan, membuat penyampaian isi pesan seolah-olah di sampaikan secara langsung.

Menurut Gunshaputra & Anggraini (2020) mengatakan bahwa saat ini dengan semakin banyak kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, bisa dikatakan masyarakat sudah mengetahui bagaimana mereka mencari kebutuhan informasi mereka. Sedangkan menurut Anwar (2015) dalam Purniati & Iqbal (2022) televisi sudah menjadi media yang sering sekali untuk dijadikan kebutuhan informasi oleh masyarakat. Kebutuhan informasi kuliner, wisata, pengetahuan, berita. Media televisi mampu membuat dunia menjadi kecil yang di kemas dalam sebuah kotak, dengan kata lain mampu memberikan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia yang cepat, aktual dan tepat ke pemirsa. Akan tetapi dalam proses terwujudnya keterbukaan informasi publik cenderung dipengaruhi oleh seberapa besar kemauan dan komitmen dari pemegang otoritas dan penyedia informasi publik (Nababan, 2019).

2.2.1 Informasi Politik

Informasi politik adalah segala bentuk data, pesan, atau pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan, institusi, proses, aktor, dan kebijakan dalam sistem politik suatu negara. Informasi ini berperan penting dalam membentuk opini publik, memfasilitasi partisipasi warga negara, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Menurut Rahmawati dan Surbakti (2020), informasi politik mencakup segala bentuk pesan yang bertujuan mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu politik, aktor politik, dan proses demokrasi. Informasi ini sangat penting dalam proses deliberasi publik dan pengambilan keputusan warga negara. Menurut Handayani & Fauzan (2018), Akses informasi politik sangat dipengaruhi oleh media digital, namun belum diimbangi dengan kemampuan menyaring dan mengkritisi isi informasinya. media sosial menjadi sumber utama informasi politik bagi generasi muda di Indonesia, namun memiliki tantangan dalam hal akurasi dan potensi polarisasi. Mereka pun menambahkan informasi politik dapat dibagi kedalam 3 jenis yaitu:

1. Informasi lembaga dan tokoh politik, yaitu berita dan data tentang pejabat, partai politik, dan lembaga negara.

2. Informasi peristiwa politik, seperti kampanye, debat, pemilu, demonstrasi.
3. Informasi kritik dan wacana Publik, yakni opini yang berkembang sebagai bentuk respons terhadap isu politik.

2.3 Peran Informasi Politik

Salah satu peran utama dari informasi politik adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem pemerintahan, peran institusi politik, hak-hak warga negara, serta proses pemilihan umum. Informasi politik juga memainkan peran sebagai pemicu partisipasi warga dalam aktivitas politik, mulai dari memilih dalam pemilu hingga terlibat dalam gerakan sosial. Rahmawati dan Surbakti (2020) menekankan bahwa akses informasi yang merata dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Di era media sosial, penyebaran informasi politik telah terbukti mampu menggerakkan massa dalam aksi kolektif seperti demonstrasi dan petisi daring.

Selain bersifat informatif, informasi politik juga membentuk opini publik dan menciptakan ruang diskusi yang sehat. Menurut Handayani dan Fauzan (2018), media terutama media sosial telah menjadi forum baru bagi masyarakat untuk mengartikulasikan sikap politik mereka terhadap isu-isu tertentu. Konten politik yang *viral* di media sosial, baik berupa berita, video, atau meme, berperan dalam membentuk persepsi publik dan memengaruhi preferensi politik. Informasi politik yang terbuka, akurat, dan dapat diakses oleh semua kalangan berkontribusi pada stabilitas sistem politik. Masyarakat yang memahami bagaimana sistem bekerja cenderung tidak mudah terprovokasi oleh *hoax* atau propaganda. Seperti yang dikatakan oleh Dahlia (2022), ditengah ancaman disinformasi digital, kehadiran informasi politik yang faktual menjadi kunci menjaga kohesi sosial dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Informasi politik tidak hanya berperan sebagai saluran komunikasi elite kepada publik, melainkan juga sebagai jembatan dua arah yang memungkinkan rakyat terlibat aktif dalam proses politik. Peranannya meliputi pendidikan politik, pendorong partisipasi, alat pengawasan, pembentuk opini, dan penjamin stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, ketersediaan dan kualitas informasi politik menjadi elemen kunci dalam membangun demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

2.4 Tinjauan Pemilihan Walikota

Pemilihan Walikota (Pilwalkot) di Indonesia dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Pemilihan ini telah dilaksanakan sejak masa kolonial belanda. Pada masa kolonial belanda walikota di tunjuk secara langsung akan tetapi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemilihan kepala daerah termasuk pemilihan Walikota dilaksanakan secara langsung dan dipilih oleh rakyat (Rossa 2022).

Sejak pertama kali dilaksanakannya pemilihan daerah di Bulan Juni 2005, Pilkada mengalami penyempurnaan baik dari penyelenggaraannya maupun regulasi nya. Secara umum, Pilkada menjadi kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka serta memutuskan apa yang pemerintah lakukan untuk mereka dan keputusan rakyat ini menentukan hak yang mereka miliki. Perubahan sistem pemilihan Walikota ini sangat dipengaruhi oleh dinamika dari politik nasional. Saat ini di Indonesia pemilihan Walikota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada sistem pilihannya pemilihan Gubernur di Indonesia menggunakan sistem pemilihan secara langsung.

Pilwalkot merupakan sebuah bagian dari proses demokrasi yang ada di negara Indonesia yang merupakan wadah untuk memilih kepala daerah di tingkat Kota. Pemilihan ini sering dianggap sebagai salah satu implementasi dari sistem pemerintahan demokratis, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Menurut Florianus Aser (2016)

pilkada langsung dapat digunakan sebagai ajang bagi daerah dalam menemukan calon-calon pemimpin daerah yang memiliki integritas dan juga bisa mengemban amanat rakyat. Pilkada langsung berpeluang mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel di mata masyarakat daerah sekaligus menguatkan derajat sebagai pemimpin.

Menurut Lili Romli, dalam jurnal Farida dkk (2020) bahwa selain mendapatkan tugas langsung dari rakyat dan mendapatkan legitimasi yang sangat kuat, kelebihan dari sebuah sistem pemilihan secara langsung yaitu sistem pemilihan langsung ini mampu memutuskan politik oligarki yang dilakukan oleh sekelompok elit dalam melakukan penentuan kepala daerah, memperkuat pengecekan dan penyeimbangan oleh DPRD, menghasilkan seorang kepala daerah yang akuntabel dan mampu menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsif terhadap rakyat. Untuk itu pemilihan kepala daerah menurut pendapat Padmo Wajono dalam penelitian (Abidin, 2023) secara sederhana adalah "pemerintahan oleh rakyat," atau, dalam kata lain, kekuasaan yang bersumber dari rakyat"untuk itu, demokrasi merupakan turunan dari kerakyatan

Menurut Susilawan dkk (2014) Pemilihan Walikota juga dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pendidikan politik bagi masyarakat. Pemilihan yang bersifat terbuka ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam mencerdaskan pemahaman politik serta dapat menjadi pembelajaran dalam demokrasi bagi rakyat sehingga terbentuknya kesadaran masyarakat akan demokrasi yang ada.

Menurut KPU dalam proses pemilihan Walikota dapat dimulai dengan pendaftaran calon yang ingin maju sebagai kandidat. Para calon Walikota biasanya berasal dari partai politik atau bisa juga melalui jalur independen. Setiap calon harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti memiliki pengalaman politik, pendidikan tertentu, dan batasan usia. Pendaftaran ini kemudian diverifikasi oleh KPU sebagai kelayakan calon.

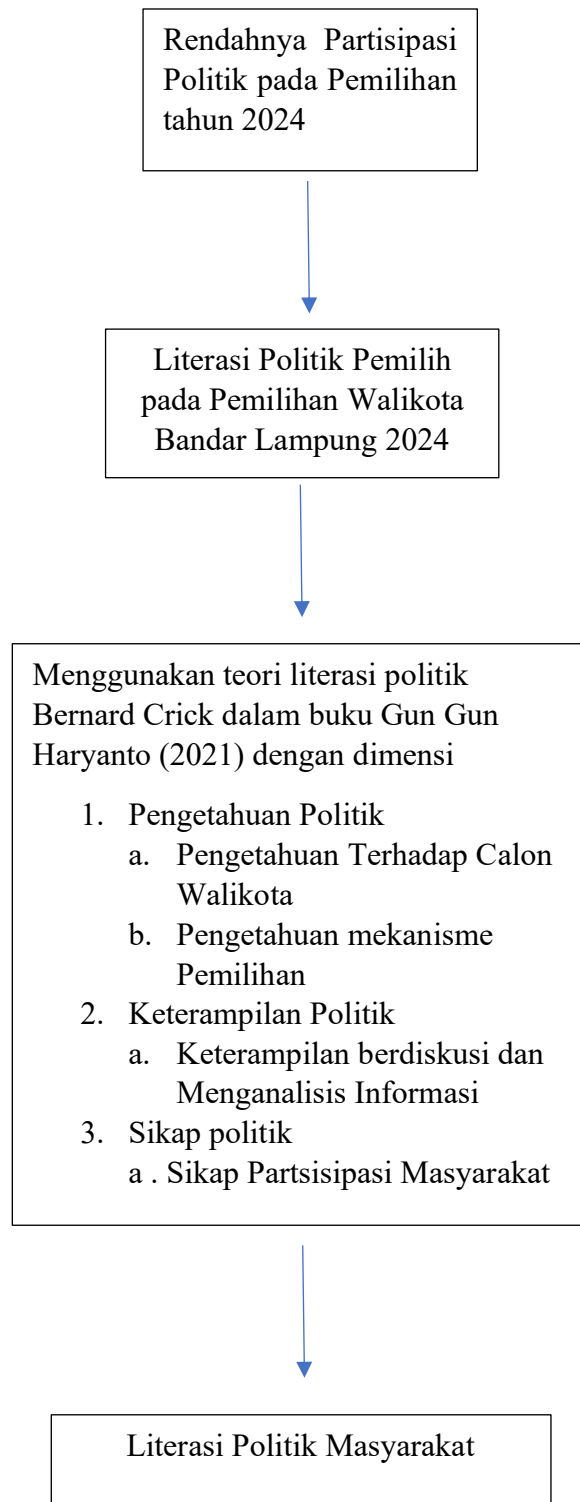
Selama masa kampanye, calon Walikota akan menyampaikan visi, misi, dan program-program kerja mereka kepada masyarakat. Kampanye ini merupakan bagian penting dari pemilihan, karena memungkinkan pemilih untuk memahami dan menilai calon yang mereka anggap layak memimpin Provinsi. Berbagai media, baik konvensional seperti televisi, radio, dan baliho, maupun media sosial, digunakan untuk menyampaikan pesan kampanye tersebut kepada pemilih. Menurut Yanti dkk (2024) dalam Santoso dkk (2024) kampanye yang dapat memanfaatkan elemen menarik, seperti video pendek, meme, dan tantangan viral, dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam partisipasi politik. Sehingga dapat memotivasi generasi muda dan untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan dengan cara yang lebih personal.

Pada hari pemungutan suara, pemilih yang terdaftar dan memenuhi syarat akan memberikan suara mereka untuk memilih calon Walikota yang mereka dukung. Pemungutan suara ini dilakukan dengan cara yang transparan dan adil untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan proses penghitungan suara yang akan menentukan siapa yang meraih kemenangan. Jika tidak ada yang mencapai suara mayoritas, sistem pemilihan dapat mengharuskan putaran kedua setelah penghitungan suara selesai dan pemenang terpilih, calon Walikota yang terpilih akan dilantik dan mulai menjalankan tugasnya.

Mirasudin (2022) peran masyarakat dalam menghadapi pemilihan kepala daerah dalam kehidupan bernegara sangat penting, efektifitas penyelenggaraan negara sangat ditentukan oleh partisipasi warga negaranya. Demikian pula dengan hal nya sistem kenegaraan yang sedang berlangsung saat ini, sangat dibutuhkannya partisipasi, peran serta aktif dari warga negara dalam hal membantu efektifitas dan efisiensi dari penyelenggaraan negara. Khususnya yang mendukung setiap kebijakan pemerintahan yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Kerangka Pikir

Untuk menjawab rumusan masalah diatas dan menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian sehingga masalah yang ada dapat terjawab terumuskan kerangka pikir yaitu pada pemilihan Walikota 2024 dimana Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan literasi politik yang ada. Untuk menilai literasi politik yang dilakukan menggunakan teori dari Bernard Crick yang dikemukakan dalam buku Gun Gun Haryanto (2021) dengan tiga indikator yaitu pengetahuan politik, keterampilan politik, dan sikap politik sehingga terlihat literasi politik masyarakat apakah tinggi , sedang atau rendah



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjudul “Literasi Politik pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2024”. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang subjek diteliti. Selaras yang dinyatakan Lexy J. Moleong (2017) bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan.

Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif yaitu jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu. Dari pendeskripsian yang menyeluruh ini membentuk kesimpulan yang dapat di tarik sehingga peneliti dapat menjawab permasalahan yang telah diajukan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau area di mana suatu penelitian dilakukan. Lokasi ini sangat penting karena memberikan konteks dan kondisi khusus yang dapat mempengaruhi hasil penelitian (Eka Dartiningsih. 2016). Pada penelitian ini lokasi yang diambil ditentukan dengan sengaja yaitu KPU Kota Bandar Lampung

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah aspek atau unsur yang harus ada dalam metode penelitian untuk memastikan penelitian tetap terarah dan terfokus pada topik yang diteliti. Fokus penelitian membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan dan menghindari kebingungan dengan informasi yang kurang akurat. Penelitian ini berfokus pada “Apa saja literasi politik yang telah dilakukan oleh TVRI, KPU Kota Bandar Lampung dan Partai Gerindra terhadap masyarakat dalam persiapan menghadapi Pilkada serentak tahun 2024”.

3.4 Penentuan Informan

(Suriani & Jailani, 2023) Penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah proses memilih individu atau kelompok yang akan menjadi sumber data untuk penelitian. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi atau data kepada peneliti melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Sugiyono : "Penentuan informan dengan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang diteliti (Suriani & Jailani, 2023). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan teknik ini kita menentukan terlebih dahulu informan yang

akan diwawancarai dan dianggap paling mengetahui masalah yang ingin dikaji alasan peneliti menggunakan purposive sampling bertujuan untuk mengambil data secara objektif, dengan anggapan bahwa data yang diambil itu merupakan keterwakilan (representatif) bagi peneliti. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan

No	Nama	Jabatan	Indikator Wawancara	
1.	Liviyanti	Kasubag tata usaha TVRI	Pengetahuan Keterampilan Sikap Politik	politik, politik,
2	Badarrudin S.H	kasubag	Pengetahuan Sikap politik	Politik,
3	Dharma Setiawan	Pengurus Partai Gerindra	Pengetahuan Keterampilan Sikap Politik	politik, Politik,
4	Ike Edwin	Tokoh Masyarakat	Pengetahuan Keterampilan politik	Politik,
5	Ferdinand	Masyarakat Pemilih	Pengetahuan Keterampilan Sikap Politik	politik, politik,
6	Mandra	Masyarakat Pemilih	Pengetahuan Keterampilan Sikap Politik	politik, politik,
7	Agung	Masyarakat Pemilih	Pengetahuan Keterampilan Sikap Politik	politik, politik,
8	Gading	Masyarakat Pemilih	Pengetahuan Keterampilan Sikap Politik	politik, politik,

Sumber Dikelola Oleh Peneliti 2024

3.5 Jenis Data

Data kualitatif dikarakterkan dengan dua tipe data yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer: menurut Sugiyono (2017) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu individu atau objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dapat diperoleh melalui teknik seperti wawancara mendalam dan observasi sehingga informasi yang didapatkan langsung dari fenomena yang diteliti.
2. Data sekunder: Menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan bukan merupakan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder bisa mencakup dokumen atau arsip yang relevan, catatan historis, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai jenis sumber lainnya yang dapat digunakan untuk mendalami fenomena yang sedang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dua arah yang dilakukan antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan informasi atau data tertentu. Dalam proses wawancara, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang relevan dengan topik yang diteliti, sementara responden memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau pandangannya. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan dengan cara tatap muka, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memperoleh informasi atau data yang diinginkan.

2. Teknik Dokumentasi

adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa arsip, laporan, catatan, buku, artikel, foto, rekaman suara, atau bentuk dokumen lain yang dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Dokumentasi sangat berguna untuk memperoleh data yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui metode lain seperti wawancara atau observasi. Teknik ini juga sering digunakan untuk mendapatkan informasi sejarah, perkembangan suatu kejadian, atau bukti-bukti lain yang mendukung hasil penelitian. Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa dan menganalisis dokumen yang ada, seperti laporan, artikel, dan catatan-catatan yang relevan untuk penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi tanpa harus terlibat langsung dengan responden atau objek penelitian

3.7 Teknik Pengolahan Data

Data kualitatif bersifat deskriptif dan tidak berwujud angka. Pengolahan data kualitatif lebih berfokus pada analisis narasi, teks, atau observasi yang dapat memberikan gambaran mendalam tentang suatu fenomena. menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, Miles dan Huberman (1994) dalam Jopang dkk (2023) menjelaskan bahwa pengolahan data melibatkan tahap-tahap seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang semuanya dilakukan secara iteratif.

3.8 Teknik Analisis Data

Merujuk pada metode atau prosedur yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memperoleh

kesimpulan yang bermakna sesuai dengan tujuan penelitian lebih bersifat interpretatif dan deskriptif.

Reduksi data menurut Creswell (2014) merupakan suatu proses penyaringan data yang besar dan rumit menjadi informasi yang lebih terfokus. Data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber perlu dikategorikan dan dipilih sesuai dengan fokus utama penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data yang terkumpul bisa berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, atau hasil observasi yang sangat banyak dan beragam. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan, sehingga peneliti dapat fokus pada hal-hal yang penting untuk menjawab pertanyaan penelitian

Penyajian data menurut Creswell (2014) merupakan proses menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk yang dapat dipahami dengan jelas. Penyajian data dalam penelitian kualitatif tidak hanya mengandalkan angka atau statistik, tetapi lebih mengutamakan narasi yang deskriptif dan tema-tema yang muncul dari wawancara atau observasi. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan hasil yang telah diperoleh dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri, pembaca, atau pemangku kepentingan lainnya.

Penarikan kesimpulan menurut Creswell (2014) dalam penelitian kualitatif berfokus pada pembuatan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah data disusun dalam bentuk yang jelas dan tema-tema utama telah ditemukan. Penarikan kesimpulan adalah langkah penting karena ini adalah bagian yang menghubungkan antara hasil penelitian dengan tujuan awal penelitian, serta memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada.

3.9 Teknik Validitas Data

Penelitian kualitatif merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan dapat dipercaya dan menggambarkan fenomena yang sedang diteliti secara akurat dan objektif. Menurut Creswell (2014) Validitas sangat penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang ada dan tidak dipengaruhi oleh bias atau kesalahan dalam proses penelitian.

1. Tringulasi sumber

Menurut Creswell (2014) tringulasi sumber merupakan salah satu teknik untuk memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif. Ia menjelaskan bahwa teknik ini dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda untuk memeriksa konsistensi temuan. Tujuannya adalah untuk mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Dalam triangulasi sumber, peneliti menggunakan berbagai sumber data yang berbeda tetapi relevan untuk menggali informasi tentang fenomena yang sama. Sumber-sumber ini bisa meliputi individu yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, atau situasi yang berbeda. Dengan menggunakan berbagai perspektif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih holistik dan mendalam.

2. *Peer Review*

Menurut Creswell (2014) teknik ini digunakan untuk memastikan validitas temuan. Dalam penelitian kualitatif, di mana data sering kali tidak terstruktur dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, *peer review* berfungsi untuk mengevaluasi apakah proses analisis data yang dilakukan sudah tepat dan konsisten dengan metode yang dipilih. *Peer review* membantu peneliti memeriksa apakah hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas sosial yang sedang diteliti dan mengurangi kemungkinan bias dalam interpretasi data, serta mengurangi bias yang mungkin timbul dari penggunaan satu perspektif teori saja.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 197,22 km² dan terdiri dari 20 kecamatan serta 126 kelurahan. Topografi Kota Bandar Lampung bervariasi, mulai dari dataran rendah di wilayah pesisir hingga perbukitan di bagian utara dan barat kota. Ketinggian wilayah berkisar antara 0–700 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini membuat Bandar Lampung memiliki panorama yang indah, dengan kombinasi pantai, teluk, dan perbukitan.

Penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah lebih dari 1 juta jiwa dan memiliki latar belakang etnis yang beragam. Selain masyarakat asli Lampung, kota ini juga dihuni oleh pendatang dari berbagai daerah seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Bugis, dan Tionghoa. Keragaman ini membentuk budaya yang dinamis dan toleran. Dari sisi sosial budaya, Bandar Lampung dikenal sebagai kota multikultural dengan tradisi lokal yang tetap terjaga. Masyarakat Lampung memiliki tradisi adat pepaduan dan piil pesenggiri, yang mengajarkan nilai kehormatan, keramahan, dan gotong royong. Kehidupan masyarakat juga diwarnai oleh kegiatan seni, musik, tari tradisional

Dalam posisi politik Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam peta politik daerah. Pemerintah kota dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pelaksanaan pemerintahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah kota bertanggung

jawab dalam urusan wajib dan pilihan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kota Bandar Lampung dikenal memiliki dinamika politik yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari aktifnya partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok kepentingan dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Partai politik besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, NasDem, dan PAN memiliki basis dukungan yang cukup kuat di kota ini. Pilihan politik masyarakat Bandar Lampung relatif plural, dengan tingkat partisipasi pemilih yang bervariasi dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung, isu-isu lokal seperti tata kota, infrastruktur, lapangan kerja, pelayanan publik, dan pengendalian banjir menjadi topik utama kampanye kandidat. Kota Bandar Lampung memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung yang beranggotakan wakil rakyat hasil Pemilu Legislatif. DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kota. Pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan kursi terbanyak. Sebagai ibu kota provinsi, kebijakan Kota Bandar Lampung sering bersinggungan langsung dengan program Pemerintah Provinsi Lampung. Koordinasi lintas level pemerintahan menjadi kunci dalam pengelolaan isu strategis seperti transportasi, tata ruang, dan penanggulangan bencana. Selain itu, posisi geografisnya yang strategis menjadikan Bandar Lampung sering menjadi lokasi kunjungan kerja pejabat pusat dan forum-forum politik tingkat nasional.

Partisipasi politik masyarakat Bandar Lampung tidak hanya terlihat dalam pemilu, tetapi juga dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), audiensi publik, dan aktivitas organisasi nonpemerintah. Kota ini memiliki banyak LSM, komunitas pemuda, kelompok mahasiswa, serta media lokal yang aktif mengawasi kebijakan publik. Keberadaan perguruan tinggi seperti Universitas Lampung, IBI Darmajaya, Universitas Bandar Lampung, dan lainnya, juga memengaruhi diskursus politik melalui kegiatan kajian, diskusi, dan gerakan advokasi kebijakan publik.

4.2 Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung berlokasi di Jalan Pulau Sebesi No. 90, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. KPU merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemilu di tingkat kota, baik untuk Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah, maupun Pemilu lainnya. KPU Kota Bandar Lampung berperan penting dalam menjaga keberlangsungan proses demokrasi dengan mengadakan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. KPU Kota Bandar Lampung juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa Pemilu yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga berperan dalam menangani isu-isu terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, termasuk pengawasan terhadap kampanye, pendataan pemilih, dan penyelesaian sengketa hasil dari pemilihan.

KPU Kota Bandar Lampung memiliki tugas dalam memfasilitasi setiap tahapan Pemilu ditingkat kota, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penyusunan tempat pemungutan suara (TPS), sampai dalam proses perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Setiap tahapan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi sesuai dari prinsip KPU itu sendiri. Dalam berjalannya proses demokrasi KPU sendiri juga harus dapat mengedukasi masyarakat agar lebih aktif dalam Pemilu. Mereka mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada pemilih, serta memastikan bahwa hak pilih setiap warga negara dapat terlaksana dengan baik dengan tujuan partisipasi dari masyarakat dapat sesuai dengan harapan.

4.3 Sejarah Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung

Sejak berdirinya pada tahun 1956, Kota Bandar Lampung telah dipimpin oleh sebelas kepala daerah, yang melalui perjalanannya mencerminkan dinamika sistem pemerintahan Indonesia. Pada awalnya, walikota diangkat melalui sistem sentralistik oleh pemerintah pusat, kemudian beralih ke mekanisme

pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hingga akhirnya masyarakat memperoleh hak untuk memilih langsung pemimpin mereka melalui pemilihan umum. Perubahan ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah politik lokal, tetapi juga mencerminkan proses demokratisasi yang lebih luas di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah pada era reformasi. Hingga tahun 2024, Kota Bandar Lampung telah melaksanakan lima kali pemilihan walikota secara langsung, yakni pada tahun 2005, 2010, 2015, 2020, dan 2024. Pemilihan langsung pertama pada tahun 2005 menjadi tonggak bersejarah, menandai peralihan dari sistem perwakilan di DPRD menuju partisipasi penuh rakyat. Dalam kontestasi perdana ini, pasangan Eddy Sutrisno dan Kherlani berhasil merebut kepercayaan warga, menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat. Pemerintahan mereka memulai era baru keterlibatan publik, dengan berbagai program pembangunan perkotaan yang lebih menekankan pada transparansi dan pelayanan.

Pada tahun 2010, kepemimpinan beralih kepada pasangan Herman H.N dan Tobroni Harun. Mereka memenangkan hati masyarakat dengan visi pembangunan berbasis pelayanan publik, infrastruktur, dan penguatan fasilitas umum. Herman H.N dikenal sebagai sosok yang dekat dengan warga dan kerap turun langsung meninjau lapangan. Pada periode berikutnya, tahun 2015, Herman kembali maju bersama Yusuf Kohar sebagai wakilnya, dan kembali memperoleh mandat rakyat untuk memimpin kota. Periode kedua kepemimpinannya fokus pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penataan ruang kota yang lebih modern. Pemilihan tahun 2020 menjadi babak baru dalam sejarah kepemimpinan kota. Eva Dwiana, berhasil memenangkan kontestasi dan mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Walikota Bandar Lampung. Didampingi oleh Dedy Amarullah sebagai wakilnya, pemerintahan Eva Dwiana membawa warna baru dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM, pemulihan ekonomi pascapandemi, serta pembangunan sosial berbasis inklusivitas. Kepemimpinannya juga menunjukkan upaya melanjutkan sejumlah program pendahulunya, namun dengan sentuhan kebijakan yang

menekankan keberpihakan pada kelompok rentan dan pengembangan ekonomi kreatif lokal.

Kini, pada Pilkada 2024, Eva Dwiana kembali mencalonkan diri sebagai petahana, menandai keikutsertaannya dalam kontestasi pemilihan langsung yang kelima di Bandar Lampung. Pemilihan ini menjadi babak penting dalam melanjutkan atau mengevaluasi arah pembangunan kota ke depan, serta menjadi cermin bagi kualitas demokrasi lokal yang semakin berkembang. Pemilihan pada tahun 2024 ini diikuti oleh 2 kontestan yaitu Eva Dwiana sebagai petahana walikota yang Kembali berpasangan dengan Deddy Amrullah setelah mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik di kota Bandar Lampung dan ditantang oleh Reihana yang berpasangan dengan Aryodhia Febriansyah setelah mendapatkan dukungan dari Partai PDI-Perjuangan dengan latar belakang yang berbeda tentunya pemilihan walikota Bandar Lampung ini akan menjadi kesempatan bagi masyarakat dalam menentukan arah dari Kota Bandar Lampung selanjutnya.

Dengan rangkaian perjalanan panjang ini, sejarah kepemimpinan Kota Bandar Lampung memperlihatkan transformasi politik yang sejalan dengan semangat demokrasi dan otonomi daerah, di mana setiap era membawa karakter, kebijakan, dan tantangan yang berbeda, namun semuanya menjadi bagian dari mozaik perkembangan kota hingga saat ini.

4.4 Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2024

Pemilihan Walikota Bandar Lampung dilaksanakan pada tahun 2024 lalu, yang mana KPU sebagai promotor melakukan beberapa tahapan sebelum pemilihan walikota dilangsungkan agar pemilihan dapat berjalan semaksimal mungkin dan berlangsung efektif sebagaimana mestinya.

4.3.1 Tahapan Pra Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, termasuk untuk Kota Bandar Lampung, yang akan diselenggarakan pada tanggal

27 November 2024. Pilkada serentak ini mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di berbagai daerah di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari agenda nasional dalam mewujudkan kesinambungan demokrasi lokal yang efektif dan terukur.

Tahapan awal pelaksanaan Pilkada dimulai sejak awal tahun 2024, dengan berbagai rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis oleh KPU untuk menjamin keterlibatan publik dan validitas proses pemilu. Beberapa kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain adalah verifikasi data pemilih, pencocokan dan penelitian data (coklit) oleh petugas pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih), serta sosialisasi tahapan pilkada kepada masyarakat melalui berbagai media dan pendekatan komunitas.

Proses coklit menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa seluruh warga yang memiliki hak pilih tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kegiatan ini dilakukan secara door-to-door untuk meningkatkan akurasi dan menghindari potensi kecurangan atau duplikasi data. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga digencarkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya kalangan muda dan pemilih pemula, yang sering kali menjadi segmen dengan tingkat partisipasi terendah.

KPU bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah daerah, serta lembaga dan elemen masyarakat lainnya turut berperan dalam mengawal seluruh proses ini agar berjalan secara luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). Keterlibatan aktif masyarakat sangat dibutuhkan, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas dan pelaku demokrasi.

Pendaftaran Pasangan Calon Pendaftaran calon dilakukan sekitar bulan Agustus hingga September 2024. Dua pasangan yang resmi mendaftar adalah: Eva Dwiana – Deddy Amarullah (petahanan, diusung partai

Gerindra dan koalisi lainnya) sementara Reihana – Aryodhia Febriansyah (diusung koalisi PDI-perjuangan dan pendukung perubahan)

Setelah itu KPU akan melaksanakan verifikasi dan penetapan calon, KPU melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap syarat pencalonan dan calon. Setelah semua syarat dinyatakan lengkap, kedua pasangan ditetapkan secara resmi sebagai calon peserta Pilkada 2024

4.3.2 Masa Kampanye dan Sosialisasi

Tahapan kampanye terbuka dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2024 berlangsung mulai dari akhir September hingga pertengahan November 2024. Dalam periode ini, kedua pasangan calon secara aktif melaksanakan berbagai bentuk kampanye untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat. Strategi kampanye yang dilakukan mencakup tatap muka langsung dengan warga, dialog terbuka, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di titik-titik strategis, serta kampanye berbasis digital yang menyasar segmen pemilih muda melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook.

Kampanye tatap muka dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan protokol kampanye dari KPU, seperti pembatasan massa dan larangan kampanye di tempat ibadah atau fasilitas pemerintah. Para calon juga menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, komunitas UMKM, serta organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa, untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja unggulan mereka.

Dalam upaya menciptakan kampanye yang lebih informatif dan berimbang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung juga memfasilitasi penyelenggaraan debat publik antar pasangan calon. Debat ini merupakan salah satu sarana penting dalam memberikan

ruang kepada publik untuk menilai kualitas gagasan dan kapabilitas calon pemimpin. Debat disiarkan secara langsung oleh TVRI, setelah terjalin kerja sama antara KPU dengan lembaga penyiaran publik tersebut.

Debat publik ini diharapkan mampu menjadi ajang adu visi, bukan sekadar retorika politik. Masyarakat didorong untuk menjadi pemilih yang cerdas, dengan mempertimbangkan program-program yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kampanye terbuka dan debat publik bukan hanya sekadar ritual demokrasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik yang substansial bagi masyarakat Bandar Lampung.

4.3.3 Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari upaya untuk menjamin hak pilih seluruh warga secara akurat, inklusif, dan valid. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah kerja sama strategis dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bandar Lampung.

Kerja sama ini bertujuan untuk menyinkronkan data administrasi kependudukan agar proses pencocokan dan penelitian (coklit) dapat dilakukan secara tepat sasaran. Fokus utama pemutakhiran ini meliputi pendataan warga yang baru berusia 17 tahun atau telah menikah, warga yang baru pindah domisili ke Kota Bandar Lampung, serta warga yang meninggal dunia atau telah pindah keluar kota, agar tidak lagi tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya data ganda, pemilih fiktif, maupun potensi kehilangan hak pilih (disenfranchisement). Dengan sistem informasi yang saling terintegrasi antara KPU dan

DUKCAPIL, proses pemutakhiran data menjadi lebih efisien dan akurat. Petugas pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih) juga melakukan verifikasi secara langsung ke lapangan melalui metode door-to-door, guna memastikan bahwa setiap individu yang memenuhi syarat terdaftar dengan benar.

Pada pemilihan tahun 2024 ini, diperkirakan terdapat sekitar 500.000 pemilih yang terdaftar dan akan menggunakan hak suaranya dalam menentukan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung untuk periode 2024–2029. Jumlah ini menunjukkan betapa besar potensi partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi arah pembangunan kota ke depan.

KPU Kota Bandar Lampung juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, untuk memastikan warga mengetahui jadwal, lokasi pencoblosan, dan pentingnya peran suara mereka dalam membentuk pemerintahan daerah yang representatif, bersih, dan bertanggung jawab.

Upaya pemutakhiran data ini merupakan fondasi penting dalam menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang luber dan jurdil, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal di Kota Bandar Lampung

4.3.4 Dinamika Politik

Pada pemilihan walikota tahun 2024, para pasangan yang maju sebagai kandidat calon walikota mengusung program kerja unggulan yang berbeda hal ini membuat masyarakat dapat memilih walikota berdasarkan keinginan masyarakat ingin dibawa kemana arah berjalannya kota Bandar Lampung kedepan

Eva Dwiana hadir dengan visi Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis

Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat. Dan dengan beberapa misi agar visi dapat tercapai yaitu meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat, meningkatkan daya dukung infrastruktur, meningkatkan masyarakat agamis berbudaya serta mengembangkan budaya daerah, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dan mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sendangkan Reihana hadir dengan visi maju, berdaya saing, berbudaya, indah, nyaman, akuntabel dan religious dengan beberapa misi sebagai pendukung visinya yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat mandiri, berdaya saing dan berakhlak, menciptakan kehidupan masyarakat yang religious dan berbudaya, menyediakan infrastruktur yang inklusif, berkualitas, aman dan nyaman. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik transparan dan akuntabel untuk meningkatkan pelayanan publik.

4.3.5 Hasil Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2024

Setelah melalui seluruh tahapan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung secara resmi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2024. Dalam rapat pleno tersebut, KPU merilis data bahwa dari total 500.000 pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 409.093 suara dinyatakan masuk dan menggunakan hak pilihnya dalam proses pencoblosan. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yaitu sekitar 81,8%, sebagai indikator meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

Dengan demikian, pasangan Eva Dwiana – Deddy Amrullah unggul telak atas lawannya dengan selisih suara yang cukup signifikan, yakni

172.000 suara, atau sekitar 74,28% dari total suara sah. Hasil ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan petahana untuk kembali memimpin Kota Bandar Lampung selama lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil tersebut, KPU Kota Bandar Lampung secara resmi menetapkan Eva Dwiana dan Deddy Amrullah sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode 2024–2029. Penetapan ini diumumkan pada tanggal 3 Desember 2024 dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh perwakilan Bawaslu, saksi dari masing-masing pasangan calon, TNI-Polri, media, serta unsur masyarakat sipil.

Penetapan ini berlangsung tanpa adanya sengketa atau gugatan hukum dari pihak pasangan Reihana – Aryodhia Febriansyah, yang menyatakan menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Dengan tidak adanya perselisihan hasil pemilu, maka proses transisi kepemimpinan dapat berjalan lebih cepat dan kondusif. Keputusan ini sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan yang akan datang, serta menjadi modal politik penting bagi pasangan terpilih dalam menyusun program kerja lima tahun ke depan. Harapannya, pemerintahan Eva Dwiana dan Deddy Amrullah dapat melanjutkan agenda pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga stabilitas dan partisipasi demokrasi di Kota Bandar Lampung.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwasanya pemerintah dan partai politik telah melakukan upaya literasi politik terhadap masyarakat hal ini terlihat dari TVRI yang telah membuat program program khusus dalam menghadapi pilkada, lalu KPU yang telah melakukan penyelenggaraan debat politik serta sosialisasi terhadap masyarakat dan partai gerindra yang telah melakukan upaya dalam meningkatkan literasi masyarakat akan tetapi menurut penelitian yang telah dilakukan bahwasannya program yang telah dibuat masih kurang efektif hal ini dapat dikatakan karna masyarakat masih banyak yang belum mengetahui terkait visi misi dari para calon yang ikut dalam pilkada.

Dalam penelitian ini juga dapat terlihat bahwasanya TVRI hanya mengandalkan 1 *platform online* sebagai tempat dilakukan *live streaming* dari program program yang telah dibuat yaitu *platform* youtube. sehingga jangkauan audiens yang didapatkan tentunya masih kurang maksimal. Hal ini menyebabkan 4 dari ke 4 narasumber pada penelitian ini tidak mendapatkan informasi terkait program yang telah dilakukan.

Pada penelitian ini juga menunjukan bahwasannya masyarakat belum memiliki keterampilan politik yang dibutuhkan untuk menghadapi pemilihan. Kurangnya ruang diskusi yang ada membuat masyarakat tidak dapat mengasah keterampilannya. TVRI sendiri hanya melakukan ruang diskusi pada program konser musik gen z dimana pada kegiatan ini bersifat terbatas sehingga tidak dapat di akses oleh masyarakat luas walaupun TVRI sendiri telah melakukan *live*

streaming tetapi masyarakat yang menonton *live* tidak dapat untuk melakukan diskusi.

Dari ke tiga unsur literasi pada penelitian ini yaitu pengetahuan keterampilan dan sikap terlihat bahwasanya masih banyak masyarakat yang tidak terlibat di dalamnya hal ini tentunya sebuah kerugian dalam proses demokrasi yang seperti mengalami kemunduran dimana terjadinya penurunan partisipasi dalam pemilihan. Hal ini membuat tidak mencapainya tujuan dari lembaga lembaga tersebut. Peneliti juga mendapati bahwasanya masyarakat peduli dan ikut serta dalam proses demokrasi akan tetapi kurangnya informasi tersebar menjadi catatan untuk lembaga lembaga terkait dikarenakan saat ini khususnya di era digital yang memudahkan dalam melakukan penyebaran informasi

Peneliti menyimpulkan bahwa literasi politik pada pemilihan walikota kota Bandar Lampung telah dilakukan oleh lembaga lembaga yang memiliki tanggung jawab terkait peningkatan literasi akan tetapi kurangnya penyebaran informasi dan dilibatkannya masyarakat secara luas membuat masyarakat masih kesulitan dalam memahami pemilihan walikota yang ada hal ini menyebabkan masyarakat memiliki tingkat literasi yang rendah dan berdampak pada penurunan jumlah partisipasi pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2024

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai literasi politik pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2024 terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga pengawas, dan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. TVRI Lampung disarankan untuk melakukan *live streaming* tidak hanya di aplikasi youtube tetapi juga melakukan *live streaming* pada aplikasi yang banyak digunakan masyarakat saat ini yaitu Instagram, facebook, dan Tiktok

2. TVRI Lampung disarankan menyediakan ruang diskusi untuk masyarakat pada acara sudut pandang sehingga masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan ahli ahli yang di undang
3. TVRI Lampung disarankan membuat konten atau iklan terkait visi misi dari para calon kepala daerah sehingga masyarakat mendapatkan informasi tersebut
4. TVRI dan partai politik disarankan mengevaluasi kegiatan atau program musik dikarnakan terlalu banyak dan sering kegiatan ini dilakukan sehingga masyarakat banyak yang kurang tertarik
5. Partai politik disarankan dapat menciptakan ruang diskusi untuk masyarakat terutama di tingkat ranting partai
6. partai politik disarankan mengevaluasi penyebaran informasi terkait kampanye sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta dalam kegiatan
7. KPU disarankan melakukan evaluasi terkait penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota 2024

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan literasi politik yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung maupun di daerah lainnya dapat semakin efektif dan optimal sehingga mampu meningkatkan partisipasi politik yang ada pada Masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. (2023). *Implikasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Akhyar Anshori, Rudianto, & Jehan Ridho Izharsyah. (2023). Dampak Literasi Politik dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula terhadap Pengendalian Informasi Hoax. *Jurnal Audiens*, 4(1), 86–97. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i1.8>
- Ali Rasyid. (2023). *Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat*. Jurnal Trias Politica Vol. I, No. I, Mei 2023
- Andini Sari. (2023) Stabilitas Politik: Pondasi bagi Pertumbuhan dan Kesejahteraan. Diakses 27 Desember 2024. <https://fuad.iainpare.ac.id/2023/11/stabilitas-politik-pondasi-bagi.html>
- Aurelia Oktavira (2024). Buzzer Bisa Dijerat UU ITE, Ini Penjelasannya. Diakses 29 Desember 2024. <https://www.hukumonline.com/klitik/a/ibuzzer-i-bisa-dijerat-uu-ite--ini-penjelasannya-lt617bdc4b99d70/>
- Ayuningtias, F. (2022). *Open Access Peran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Palu Dalam Menyebarkan Informasi Pendidikan The Role Of The Television Service Of Republic Of Indonesia Palu In Disseminating Educational Information*.
- Cresswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE, 2014
- Dedi, A. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Moderat*, 8(1).
- Fajar Pratama, A., Juwandi, R., Febrian, Bahrudin, A., Pendidikan, J., Dan, P., Fkip, K., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2022). Pengaruh Literasi Politik dan Informasi Hoax terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. In *Journal of Civic Education* (Vol. 5, Issue 11).
- Farida, I., Permana, N., Ismail, S., & Hasanudin, M. (2020). *Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia An Analysis Of The Impact Of Direct Election For Local Leaders: Reformulation Of Election For Local Leaders System In Indonesia*. Journal of law | Vol. 1 Juli 2020
- Fitriani, A., Oevang, J., Nomor, O., & Sintang, B. K. (2023). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Jurnal Fokus.
- Fitriani, L., Aminudin, I., & Rengi, P. (2022). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP LITERASI POLITIK GENERASI MILENIAL. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 46–55.

- Florianus Aser, O. (2016). *HUBUNGAN PILKADA SERENTAK DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH (Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih Dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan)*. Jurnal Politikologi Vol. 3 \ No. 1 \ Oktober 2016 \ 19 – 26
- Gun Haryanto,G (2021) Strategi Literasi Politik sebuah pendekatan teoritis dan praktis. IRCiSoD
- Hernitasari, S. N. (2023). *Perbandingan Literasi Politik Antara Desa Ciheras Kabupaten Tasikmalaya Dengan Kelurahan Sukaasih Kota Tasikmalaya (Analisis Pada Masyarakat Yang Telah Memiliki Hak Pilih Dalam Pemilu Tahun 2019)*.
- Kadarisman,A & Gemiharto, I (2017) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat). Jurnal Agresi /Volume 5 / Nomor 1 / Tahun 2017 / Hal. 1 - 115
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Kota Pariaman Tahun. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik |Volume 2 | Nomor 2| Tahun 2020 | (Hal. 70-79)*.
- Lestari, F. D., Ibrahim, M., Ghufro, S., & Mariati, P. (2021). Pengaruh Budaya Literasi terhadap Hasil Belajar IPA di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, 5(6), 5087–5099.
- Mirasudin. (2022). *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah)*. Jurnal Hukum Ketatanegaraan | Vol 1 No 1 Edisi Juni 2022
- Moleong, L. J. (2017). Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 6
- Nababan, S. (2019). *Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 17 Nomor 2,
- Nupikso. (2022). Peluang dan Hambatan TVRI Sebagai Penyelenggara Multiplexing Opportunities and Obstacles of TVRI as a Multiplexing Operator. In *Jurnal_Pekommas_Vol._7_No* (Vol. 2).
- Odi, R. (2023). *Pengaruh Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipasi Mahasiswa PPKN FKIP Universitas Lampung*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Lampung
- Rumata, V. M. (2017). Perilaku Pemenuhan dan Penyebaran Informasi Publik Bagi Masyarakat Kota dan Desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(1), 91–106.
- Sahbana. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Warta Edisi* : 51.
- Santoso, rudi. (2024). Strategi Kpu Kota Bandar Lampung Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Generasi Z Dan Milenial Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No. 2 Desember*.

- Sugiyono, D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabet, 2014
- Sulistiyo, A. (2024). *Politik Digital Anak Muda Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Literasi Politik Pada Pemilu 2024*. Skripsi. Fakultas Studi Agama, Uin Lampung
- Susilawan, M. A., Dan, I., & Haryono, D. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil... Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014.
- Sutisna, A. (2017). Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora |6(2), 257–270.